

LAPORAN
PENELITIAN DOSEN JUNIOR PUSAT STUDI
TAHUN ANGGARAN 2010

Evaluasi Kesiapan Implementasi Sekolah Kategori Mandiri
SMP Negeri 2 Banguntapan Bantul



Oleh:

Lia Yuliana, M.Pd
Meilina Bustari, M.Pd
Safitri Yosita Ratri, M.Pd

**Dibiayai oleh DIPA-UNY, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan
Penelitian Nomor 10/H34.21/KTR.KK/2010, tanggal 18 Mei 2010**

PUSAT STUDI DASAR DAN MENENGAH
LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2010

A. Judul Penelitian

Evaluasi Kesiapan Implementasi Sekolah Kategori Mandiri SMP Negeri 2 Banguntapan Bantul

B. Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kesiapan implementasi sekolah kategori mandiri yang meliputi; (1) upaya kepala sekolah, guru dan siswa dalam implementasi Sekolah Kategori Mandiri di SMP Negeri 2 Banguntapan Bantul; (2) kesiapan sarana dan prasarana dalam menunjang kesiapan implementasi Sekolah Kategori Mandiri; (3) dan kendala dan usaha yang dilakukan sekolah dalam kesiapan implementasi Sekolah Kategori Mandiri.

Subjek penelitian terdiri adalah kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, guru, staf administrasi dan siswa yang ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Model evaluasi yang digunakan adalah evaluasi kesenjangan (*discrepancy*) yang terdiri dari lima komponen, yaitu: penyusunan program, *installed* program, proses, produk, dan perbandingan. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah angket, pengamatan dan wawancara. Validasi instrumen dilakukan dengan validitas isi dan validitas konstruk, dan perhitungan reliabilitas instrumen menggunakan koefisien *Alpha Cronbach*. Analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kesiapan kepala sekolah, guru dan siswa dalam implementasi Sekolah Kategori Mandiri SMP N 2 Banguntapan untuk komponen penyusunan program dan proses termasuk dalam sekolah kategori mandiri I (yaitu 80.53%, atau mencapai > 75%), hal itu menunjukkan bahwa guru dan kepala sekolah memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memadai untuk menunjang terlaksananya Sekolah Kategori Mandiri dan telah melaksanakan sistem kelas berpindah (*moving class*), sedangkan komponen *installed* program termasuk dalam sekolah standar III (yaitu 65.67, atau kurang dari 75%) yang ditunjukkan dengan sistem pembelajaran yang tidak berdasarkan satuan kredit semester dan komponen produk termasuk dalam sekolah standar kategori II (yaitu 48.96%, atau kurang dari 50%) yang ditunjukkan dengan belum dilaksanakannya penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan indeks prestasi. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah untuk menunjang keterlaksanaan Sekolah Kategori Mandiri terungkap bahwa sarana prasarana yang dimiliki secara rata-rata mencapai 64.47% dan termasuk dalam kriteria Kategori Standar III. Kendala sekolah dalam kesiapan implementasi Sekolah Kategori Mandiri adalah pada komponen *installed* program dan produk. Kendala dalam komponen *installed* program ini salahsatunya tercermin dalam pembelajaran yang tidak berdasarkan satuan kredit semester, sedangkan komponen produk dalam implementasinya belum dilaksanakan penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan indeks prestasi.

C. Pendahuluan

Pendidikan memegang peranan sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sebab peningkatan kualitas pendidikan mempunyai suatu proses yang terintegrasi dalam peningkatan sumber daya manusia itu sendiri. Sumber daya yang berkualitas sangat diperlukan untuk pembangunan dan kelangsungan hidup bangsa untuk mempersiapkan peserta didik yang mampu mengembangkan dan menampilkan keunggulan dirinya sebagai manusia berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, inisiatif, mandiri serta sehat jasmani dan rohani.

Salah satu masalah pendidikan yang kita hadapi dewasa ini adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualifikasi guru, penyediaan dan perbaikan sarana/prasarana pendidikan, serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang merata. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu yang cukup menggembirakan, namun sebagian lainnya masih memprihatinkan. Dari berbagai pengamatan dan analisis, sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata (Sih, 2006:70-71).

Pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *educational production function* yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipilih semua *input* (masukan) yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga ini akan menghasilkan *output* yang dikehendaki. Dalam kenyataan, mutu pendidikan yang diharapkan tidak terjadi, hal ini disebabkan karena selama ini dalam menerapkan pendekatan *education production function* terlalu memusatkan pada input pendidikan dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan. Padahal, proses pendidikan sangat menentukan *output* pendidikan.

Kedua, penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik, sehingga sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi, yang kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Dengan demikian sekolah kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.

Ketiga, peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat pada umumnya selama ini lebih banyak bersifat dukungan dana, bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas). Berkaitan dengan akuntabilitas, sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, khususnya orang tua siswa, sebagai salah satu pihak utama yang berkepentingan dengan pendidikan.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan, salah satunya yang sekarang sedang dikembangkan adalah reorientasi penyelenggaraan pendidikan, melalui manajemen sekolah (*School Based Management*). Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keluwesan, dan sumber daya untuk meningkatkan mutu sekolah. Dengan kemandiriannya, maka:

1. Sekolah sebagai lembaga pendidikan lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya dibanding dengan lembaga-lembaga lainnya.
2. Dengan demikian sekolah dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan lembaganya.
3. Sekolah lebih mengetahui sumber daya yang dimilikinya dan *input* pendidikan yang akan dikembangkan serta didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik,
4. Sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing

kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga sekolah akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan.

5. Sekolah dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah-sekolah yang lainnya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat.

Esensi dari MBS adalah otonomi dan pengambilan keputusan partisipasi untuk mencapai sasaran mutu sekolah. Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan (kemandirian), yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Jadi, otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Kemandirian yang dimaksud harus didukung oleh sejumlah kemampuan, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan yang terbaik, kemampuan berdemokrasi/menghargai perbedaan pendapat, kemampuan memobilisasi sumber daya, kemampuan memilih cara pelaksanaan yang terbaik, kemampuan berkomunikasi dengan cara yang efektif, kemampuan memecahkan persoalan-persoalan sekolah, kemampuan adaptif dan antisipatif, kemampuan bersinergi dalam berkolaborasi, dan kemampuan memenuhi kebutuhan sendiri.

Dengan pola MBS, sekolah memiliki kewenangan (kemandirian) yang lebih besar dalam mengelola manajemennya sendiri. Kemandirian tersebut di antaranya meliputi penetapan sasaran peningkatan mutu, penyusunan rencana peningkatan mutu, pelaksanaan rencana peningkatan mutu dan melakukan evaluasi peningkatan mutu. Di samping itu, sekolah juga memiliki kemandirian dalam menggali partisipasi kelompok yang berkepentingan dengan sekolah. Di sinilah letak ciri khas MBS. Berdasarkan konsep dasar yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan penyesuaian diri dari pola lama manajemen pendidikan menuju pola baru manajemen pendidikan masa depan yang lebih bernuansa otonomi yang demokratis.

Seiring dengan bergulirnya era otonomi daerah, terbukalah peluang untuk melakukan reorientasi paradigma pendidikan menuju ke arah desentralisasi pengelolaan pendidikan. Peluang tersebut semakin tampak nyata setelah dikeluarkannya kebijakan mengenai otonomi pendidikan melalui strategi pemberlakuan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS bukan sekedar mengubah pendekatan pengelolaan sekolah dari yang sentralistik ke desentralistik, tetapi lebih dari itu melalui MBS akan muncul kemandirian sekolah.

Melalui penerapan MBS, kepedulian masyarakat untuk ikut serta mengontrol dan menjaga kualitas layanan pendidikan akan lebih terbuka untuk dibangkitkan. Dengan demikian kemandirian sekolah akan diikuti oleh daya kompetisi yang tinggi akan akuntabilitas publik yang memadai.

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) pada sekolah berada di bagian terdepan dari proses pendidikan, sekolah harus menjadi bagian utama di dalam proses pembuatan keputusan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Sedangkan pemerintah pusat berperan sebagai pendukung dalam hal menentukan kerangka dasar kebijaksanaan pendidikan. MPMBS merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreativitas sekolah, sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengelola dirinya yang berkaitan dengan permasalahan sekolah, dengan kerangka arah kebijaksanaan yang telah dirumuskan pemerintah.

Konsep otonomi sekolah menawarkan akan adanya kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah dengan tanggungjawabnya masing-masing. Penekanan otonomi ini adalah pemberian kemandirian sekolah untuk ikut terlibat secara aktif dan dinamis dalam rangka proses peningkatan kualitas pendidikan melalui pengelolaan sumber daya sekolah yang ada.

Sekolah harus dapat memformulasikan kebijakan makro ke dalam kebijakan mikro. Sekolah secara mandiri tetapi masih dalam kerangka acuan kebijakan nasional mempunyai tanggung jawab yang dimiliki sesuai dengan kondisi keutuhan belajar siswa dan masyarakat. Menurut Sih (Juni 2006:71), pada hakikatnya otonomi pendidikan itu adalah dimungkinkannya sekolah sebagai unit terkecil institusi pendidikan dapat menentukan nasib sendiri (*self determination*).

Namun, ternyata berdasarkan UU No.22/1999 dan peraturan pelaksanaannya, seluruh kewenangan pengajaran dan pendidikan pada umumnya sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat II (Sih, Juni 2006:71).

Salah satu implikasi dari Peraturan Pemerintah tersebut adalah Pemerintah berkepentingan untuk melakukan pemetaan sekolah/madrasah dengan melakukan pengkategorian sekolah khususnya di SMP berdasarkan tingkat terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan. Pengkategorian sekolah/madrasah dilakukan dalam kategori standar, mandiri dan bertaraf internasional, dan keunggulan lokal. Menindaklanjuti kebijakan pengkategorian sekolah/madrasah tersebut, strategi yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMP pada tahun anggaran 2007 adalah melakukan rintisan penyelenggaraan SMP Kategori Mandiri sesuai dengan UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP Nomor 19 tahun 2005.

Sekolah Kategori Mandiri (*Self Supported School/Triple S*) adalah program berbasis pendampingan atau asistensi ini bertujuan mengoptimalkan sekolah-sekolah yang tergabung di dalamnya untuk mengembangkan potensi lokalnya terutama dalam hal pengelolaan lingkungan belajar dan peran serta masyarakat sekitar. Program ini juga sejalan dengan program pemerintah yaitu sekolah yang memiliki tingkat relevansi tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

D. Rumusan masalah

1. Seberapa besar kesiapan kepala sekolah, guru dan siswa dalam implementasi Sekolah Kategori Mandiri di SMP Negeri 2 Banguntapan Bantul?
2. Seberapa besar kesiapan sarana dan prasarana dalam menunjang kesiapan implementasi Sekolah Kategori Mandiri di SMP Negeri 2 di Banguntapan Bantul?
3. Kendala dan usaha apa yang dilakukan pihak sekolah dalam kesiapan implementasi Sekolah Kategori Mandiri di SMP Negeri 2 Banguntapan Bantul?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian evaluasi ini bertujuan:

1. Seberapa besar kesiapan kepala sekolah, guru dan siswa dalam implementasi Sekolah Kategori Mandiri di SMP Negeri 2 Banguntapan Bantul
2. Seberapa besar kesiapan sarana dan prasarana dalam menunjang kesiapan implementasi Sekolah Kategori Mandiri di SMP Negeri 2 di Banguntapan Bantul
3. Kendala dan usaha apa yang dilakukan pihak sekolah dalam kesiapan implementasi Sekolah Kategori Mandiri di SMP Negeri 2 Banguntapan Bantul

F. Kajian Teori

1. Konsep Sekolah Kategori Mandiri

a. Pengertian Sekolah Kategori Mandiri

Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan merupakan salah satu pilar pembangunan pendidikan yang secara simultan harus dilaksanakan dengan pilar pembangunan pendidikan lainnya. Berbagai upaya pemerintah dalam mewujudkan pendidikan bermutu, relevan dan daya saing telah banyak dilakukan melalui berbagai inovasi pendidikan dan pembelajaran, perubahan kurikulum serta ditetapkannya perangkat-perangkat yang melandasinya.

Menurut Cece Wijaya (1992: 9) pendidikan merupakan upaya manusia secara sadar yang tujuannya bersifat ganda, yaitu mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia. Upaya yang sadar itulah yang menandakan sifat kesengajaan dari pendidikan. Pendidikan adalah satu cara utama bagaimana masyarakat mempengaruhi perilaku warganya. Pendidikan nasional di Indonesia tidak hanya membentuk warga negara yang baik, tetapi juga bertugas mencerdaskan bangsa secara terus menerus, khususnya untuk kepentingan generasi muda di seluruh Indonesia. Pendidikan dilakukan secara formal di sekolah dan secara non-formal di lembaga-lembaga luar sekolah.

Perbedaan antara Sekolah Formal Standar dan Sekolah Kategori Mandiri adalah sebagai berikut: a). Sekolah Formal Standar adalah (1) Sekolah yang belum memenuhi seluruh kriteria yang telah ditetapkan dalam standar pendidikan

nasional, (2) Menyelesaikan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket selama 3 tahun, (3) Adanya kenaikan kelas pada setiap tahun pelajaran, (4) Menggunakan model penilaian secara berkala dan berkesinambungan, (5) Hasil penilaian dinyatakan dengan angka, (6) Menggunakan pembelajaran tuntas (*mastery learning*) dalam belajar sampai taraf penguasaan bahan sepenuhnya, siswa dapat melangkah pada berikutnya setelah ia menguasai bahan pelajaran (Dit.Pembinaan SMP, 2006:4-6), (b) Sekolah kategori mandiri adalah (1) Sekolah yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, (2) Menyelesaikan studi sesingkat-singkatnya dengan menggunakan sistem satuan kredit semester (SKS), (3) Tidak mengenal kenaikan kelas, (4) Penilaian untuk suatu mata pelajaran dengan dinyatakan lulus dan tidak lulus, (5) Hasil penilaian dinyatakan dengan huruf, (6) Memberikan kesempatan kepada siswa dapat mengambil mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan (Dit.Pembinaan SMA, 2007:2-7).

Satuan Kredit Semester (SKS) adalah salah satu sistem penerapan program pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai subyek. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, yaitu bagaimana peserta didik belajar. Peserta didik diberi kebebasan untuk merencanakan kegiatan belajarnya sesuai dengan minat, kemampuan, dan harapan masing-masing. Minat ini besar sekali pengaruhnya terhadap belajar, sebab dengan minat seseorang akan melakukan sesuatu yang diminatinya (Moch.Uzer Usman, 1994:22).

Pengkategorian ini didasarkan pada tingkat terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan meliputi: (1) standar isi, (2) standar kompetensi lulusan, (3) standar proses, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan. Pengertian masing-masing standar tersebut adalah: sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Mengacu pada berbagai pengertian tersebut di atas, maka program Sekolah Kategori Mandiri yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan (SMA/MA) dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan

Sekolah memiliki dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang memuat komponen yang dipersyaratkan dan telah disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Penyusunan KTSP dilakukan secara mandiri dengan membentuk Tim KTSP. Komponen KTSP memuat tentang visi, misi, tujuan, dan struktur dan muatan KTSP. KTSP dilengkapi dengan silabus yang penyusunannya melibatkan seluruh guru dari sekolah yang bersangkutan (Permen no: 22, 24/2006)

2. Standar Proses

Sekolah mempunyai perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana, melakukan penilaian dengan berbagai cara, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh proses pendidikan yang terjadi di sekolah untuk mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan pembelajaran mengacu pada tujuh prinsip pelaksanaan kurikulum. Sekolah telah menerapkan sistem Satuan Kredit Semester (SKS).(Permen no: 41/2007)

3. Standar Pengelolaan

Pengelolaan sekolah didasarkan pada perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi manajemen. Sekolah mengembangkan perencanaan program mulai dari penetapan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja. Pelaksanaan rencana kerja sekolah didasarkan pada struktur organisasi dan pedoman pengelolaan secara tertulis dibidang kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan. Disamping itu pelaksanaannya juga mempertimbangkan budaya dan lingkungan sekolah, serta melibatkan peran serta masyarakat. (Permen no: 19/2007)

4. Standar Sarana dan Prasarana

Sekolah memiliki sarana dan prasarana meliputi satuan pendidikan, lahan, bangunan gedung, dan kelengkapan sarana dan prasarana. Sekolah minimum memiliki tiga rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan

belajar. Dimana SMP dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 6000 jiwa. Lahan yang dimiliki sekolah memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah berupa bangunan gedung dan tempat bermain/berolahraga. Lahan harus memenuhi kriteria kesehatan dan keselamatan, kemiringan, pencemaran air dan udara, kebisingan, peruntukan lokasi, dan status tanah. Bangunan gedung memenuhi rasio minimum luas lantai, tata bangunan, keselamatan, kesehatan, fasilitas penyandang cacat, kenyamanan, keamanan. Bangunan gedung dipelihara secara rutin. Kelengkapan sarana prasarana yang tersedia meliputi: (1) ruang kelas, (2) ruang perpustakaan, (3) ruang laboratorium biologi, (4) ruang laboratorium fisika, (5) ruang laboratorium kimia, (6) ruang laboratorium komputer, (7) ruang laboratorium bahasa, (8) laboratorium IPS, (9) ruang pimpinan, (10) ruang guru, (11) ruang tata usaha, (12) tempat beribadah, (13) ruang konseling, (14) ruang UKS, (15) ruang organisasi kesiswaan, (16) jamban, (17) gudang, (18) ruang sirkulasi, (19) tempat bermain/berolahraga, (20) ruang multimedia. (Permen no: 24/2007)

5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Keberhasilan pelaksanaan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia sekolah yang terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik secara kualitas harus memenuhi kualifikasi akademik, sertifikasi profesi dan kesesuaian pendidikan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Sedangkan secara kuantitas harus memenuhi ketentuan rasio guru dan siswa. Sedangkan tenaga kependidikan sekurang-kurangnya terdiri dari kepala Sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan. Tenaga kependidikan sekolah harus memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan. (Permen :12,13,16/ 2007)

6. Standar Pembiayaan

Pembiayaan Sekolah didasarkan pada rancangan biaya operasional program kerja tahunan meliputi investasi, operasi, dan biaya personal.

Sumber pembiayaan sekolah dapat berasal orang tua siswa, masyarakat, pemerintah dan donatur lainnya. Penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan dan dikelola secara transparan dan akuntabel. (Permen no: 00/2008)

7. Standar Penilaian Pendidikan

Sekolah melaksanakan penilaian pendidikan melalui proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian mengacu pada prinsip penilaian dengan menggunakan teknik dan instrumen penilaian yang sesuai berdasarkan mekanisme dan prosedur penilaian terstandar. Penilaian dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. (Permen no: 20/2007)

Standar Nasional Pendidikan Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional adalah sekolah yang mampu mengoptimasikan pencapaian tujuan pendidikan, potensi dan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi peserta didik berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan tersebut sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Program rintisan Sekolah Kategori Mandiri pada dasarnya adalah program terpadu yang mengkaitkan antara kebijakan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), pelaksana kebijakan (sekolah sasaran rintisan), pendampingan dan pengembangan konsep implementasi, dukungan dan pembinaan dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta supervisi dan evaluasi, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota). Keterpaduan tersebut merupakan implementasi dari penjelasan PP Nomor 19 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa berbagai upaya ditempuh agar alokasi sumberdaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk membantu sekolah/madrasah yang masih dalam kategori standar untuk bisa meningkatkan diri menuju kategori mandiri/standar nasional.

b. Karakteristik Sekolah Kategori Mandiri

Berdasarkan penjelasan PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 11 ayat (2) bahwa ciri Sekolah Kategori Mandiri adalah terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan dan mampu menjalankan sistem kredit semester (Ditjen Pembinaan SMP, 2008:4). Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi menyatakan bahwa sistem kredit semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Dari ciri tersebut Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional memiliki profil sebagai persyaratan minimal, yakni: dukungan *Internal*, yang meliputi: (1) kinerja sekolah indikator terakreditasi A, rerata nilai Ujian Nasional (UN) tiga tahun terakhir minimum 7,00, persentase kelulusan Ujian Nasional (UN) lebih besar atau sama dengan 90 % untuk tiga tahun terakhir, animo tiga tahun terakhir lebih besar daya tampung, prestasi akademik dan non akademik yang diraih, melaksanakan manajemen berbasis sekolah, jumlah siswa per kelas maksimal 32 orang, ada pertemuan rutin pimpinan dengan guru, ada pertemuan rutin sekolah dengan orang tua; (2) kurikulum, dengan indikator memiliki kurikulum Sekolah Kategori Mandiri, beban studi dinyatakan dengan satuan kredit semester, mata pelajaran yang ditawarkan ada yang wajib dan pilihan, panduan/dokumen penyelenggaraan, memiliki pedoman pembelajaran, memiliki pedoman pemilihan mata pelajaran sesuai dengan potensi dan minat, memiliki panduan menjajagi potensi peserta didik dan memiliki pedoman penilaian; (3) kesiapan sekolah, dengan indikator sekolah menyatakan bersedia melaksanakan Sistem Kredit Semester, persentase guru yang menyatakan ingin melaksanakan SKS lebih besar atau sama dengan 90%, Pernyataan staf administrasi akademik bersedia melaksanakan SKS, Kemampuan staf administrasi akademik dalam menggunakan komputer; (4) sumber daya manusia, dengan indikator persentase guru memenuhi kualifikasi akademik lebih besar atau sama dengan 75%, relevansi guru setiap mata pelajaran dengan latar belakang pendidikan (90 %), rasio guru dan siswa, jumlah tenaga administrasi akademik memadai, tersedia guru bimbingan konseling/ karir; (5) fasilitas di sekolah, dengan indikator memiliki ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang guru, ruang bimbingan, ruang Unit Kesehatan, tempat

olahraga, tempat ibadah, lapangan bermain, komputer untuk administrasi, memiliki laboratorium: Bahasa, Teknologi informasi/komputer, Fisika, Kimia, Biologi, Multimedia, IPS, Perpustakaan yang memiliki koleksi buku setiap mata pelajaran, memberikan Layanan bimbingan karir dan dukungan *eksternal* untuk menyelenggarakan Sekolah Kategori Mandiri berasal dari dukungan komite sekolah, orang tua peserta didik, dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dukungan dari tenaga pendamping pelaksanaan Satuan Kredit Semester (SKS) (Ditjen Pembinaan SMA, 2008:4).

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi menyatakan bahwa sistem kredit semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Mengacu pada konsep tersebut, SKS dapat diterapkan untuk menunjang realisasi konsep belajar tuntas yang digunakan dalam menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Ditjen Pembinaan SMA, 2008:4). Pada Sistem Kredit Semester, setiap satu satuan kredit semester (1 SKS) berbobot dua jam kegiatan pembelajaran per-minggu selama 16 minggu per-semester. Pada SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, satu jam kegiatan tatap muka berlangsung selama 45 menit, sedangkan 25 menit kegiatan terstruktur dan 25 menit kegiatan mandiri.

Dengan demikian, penerapan Satuan Kredit Semester (SKS) pada Kurikulum satuan Tingkat Pendidikan (KTSP) perlu dilakukan penyesuaian dengan menggunakan pendekatan pembelajaran tuntas di mana satuan kegiatan belajar peserta didik tidak diukur berdasarkan lama waktu kegiatan per-minggu/per-semester tetapi pada satuan (unit) kompetensi yang dicapai.

2. Pengelolaan Kurikulum Sekolah Kategori Mandiri

Kurikulum yang diterapkan pada Sekolah Kategori Mandiri pada dasarnya tidak berbeda dengan sekolah formal standar pada umumnya. Kurikulum yang digunakan yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dimana penerapan kurikulum itu mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan berpedoman pada panduan penyusunan

kurikulum yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) serta memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah/madarasah tersebut, juga penyusunannya dilakukan di tingkat provinsi.

Menurut Sofyanis (2007: 25) kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah masing-masing.

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari delapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. Dengan demikian Sekolah Kategori Mandiri di SMA adalah kurikulum SMA yang disusun berdasarkan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang berlaku secara nasional (Ditjen Pembinaan SMA, 2008:5), sehingga lulusan sekolah Kategori Mandiri memiliki kualifikasi dan standar kompetensi sesuai dengan standar nasional pendidikan

Pengembangan kurikulum disusun antara lain agar dapat memberi kesempatan kepada peserta didik untuk: (a) belajar untuk beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) belajar untuk memahami dan menghayati; (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif; (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain; dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar aktif, kreatif, dan menyenangkan (PAKEM).

Menurut Seller dan Miller (Sofyanis, 2007: 25), kurikulum ialah seperangkat interaksi bertujuan yang secara langsung maupun tidak langsung dirancang untuk memfasilitasi belajar agar lebih bermakna. Interaksi langsung biasanya mengambil bentuk kurikulum tertulis dan mata pelajaran-mata pelajaran, adapun interaksi yang tidak langsung dapat ditemukan dalam “kurikulum tersembunyi” (*hidden curriculum*), yaitu semua hal yang tidak direncanakan dan tidak terjadi di sekolah, tetapi dialami, dan dipelajari peserta didik. Pasal 1 butir 19 Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Sofyanis, 2007:26) Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Kurikulum, dalam pengertian kurikulum tertulis, mempunyai empat komponen pokok, yakni: tujuan, materi, metode dan evaluasi (Sofyanis, 2007: 27)

Tujuan memiliki peranan penting, karena akan mengarahkan semua kegiatan pembelajaran dan akan mewarnai komponen-komponen kurikulum lainnya. Tujuan kurikulum dirumuskan berdasar dua hal. Pertama, tuntutan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), keperluan, dan kondisi masyarakat. Kedua, didasari oleh pemikiran-pemikiran yang terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofis.

Berdasar cakupannya, kita mengenal beberapa kategori tujuan, yakni tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, tujuan jangka pendek, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan jangka panjang merupakan tujuan pendidikan nasional, yaitu tujuan yang akan dicapai oleh sesuatu lembaga pendidikan. Termasuk tujuan jangka menengah ialah tujuan kurikuler, yang akan dicapai oleh sesuatu program studi. Adapun tujuan jangka pendek tercermin dalam tujuan pembelajaran yang meliputi tujuan pembelajaran umum (TPU) maupun tujuan pembelajaran khusus (TPK). Dalam mempersiapkan pelajaran, guru harus

menjabarkan tujuan mangajarnya dalam bentuk-bentuk tujuan khusus yang operasional sehingga jelas dan mudah mengukurnya.

Materi atau bahan ajar merupakan sekumpulan fakta, konsep, prinsip, prosedur, teori atau kombinasi dari berbagai hal tersebut yang akan disampaikan kepada peserta didik. Dalam menyusun bahan ajar, guru perlu memperhatikan tiga hal penting, yakni *kontinuitas*, *sekuens*, dan *integritas*. *Kontinuitas*, artinya bahwa pengalaman belajar belajar yang akan disampaikan di kelas harus memiliki kesinambungan dengan pengalaman belajar di luar kelas, *sekuens* atau urutan artinya bahwa pengalaman belajar yang diberikan di kelas sebelumnya harus menjadi dasar bagi pengalaman belajar yang akan diberikan di kelas selanjutnya, *integritas* artinya bahwa pengalaman belajar yang akan diberikan kepada siswa harus diarahkan menjadi pengalaman belajar terpadu yang berguna untuk memecahkan persoalan hidup sehari-hari.

Metode terkait erat dengan tipe bahan ajar atau materi. Pada saat guru menyusun materi, ia harus sudah memikirkan metode apa yang cocok dengan materi tersebut. Di samping itu, guru disarankan untuk menggunakan metode yang meningkatkan kebermaknaan materi bagi peserta didik, yakni dengan menghubungkan materi dengan struktur kognitif yang ada pada peserta didik. Evaluasi merupakan komponen kurikulum yang berfungsi untuk menilai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan serta untuk menilai proses pelaksanaan pembelajaran secara keseluruhan. Tiap kegiatan akan memberikan umpan balik yang digunakan untuk mengadakan usaha penyempurnaan baik bagi penetapan perumusan tujuan, pemilihan metode.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Seperti halnya kurikulum nasional KTSP disusun mencakup tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan dan silabus. Sebagai perwujudan dari kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk

pendidikan menengah berpedoman pada Standar Isi dan Standar Kompetensi Kelulusan serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP.

Setiap guru yang mengajar di Sekolah Kategori Mandiri perlu terlebih dulu melakukan analisis materi pelajaran untuk menentukan sifat materi yang esensial dan kurang. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip: (1) berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, (2) beragam dan terpadu, (3) tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, (4) relevan dengan kebutuhan kehidupan, (5) menyeluruh dan berkesinambungan, (6) belajar sepanjang hayat, (7) seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah (Sofyanis, 2007:40). Berdasarkan paparan di atas dapat dikemukakan bahwa kurikulum dan materi pelajaran yang digunakan dalam penyelenggaraan Sekolah Kategori Mandiri adalah kurikulum yang disusun satuan pendidikan dengan pengorganisasian materi kurikulum dibuat menjadi materi umum/wajib dan materi khusus/pilihan. Bentuk pengelolaan yang sesuai dengan uraian di atas adalah kurikulum yang disusun menggunakan pendekatan satuan kredit semester.

Menurut Ditjen Pembinaan SMA (2008:6) menyatakan bahwa penerapan Satuan Kredit Semester (SKS), kurikulum dan beban belajar peserta didik dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS). Mata pelajaran dikelompokkan menjadi tiga, yaitu mata pelajaran umum (MPU), mata pelajaran dasar (MPD), dan mata pelajaran pilihan (MPP). MPU harus diambil oleh semua peserta didik sebagai proses pembentukan pribadi yang memiliki akhlak mulia, kepribadian, estetika, jasmani yang sehat, dan jiwa sebagai warganegara yang baik. MPD harus diambil peserta didik sebagai landasan menguasai semua bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. MPP adalah sejumlah mata pelajaran yang disusun menjadi program bidang tertentu yang dipilih sesuai dengan minat, potensi dan kebutuhan serta orientasi bidang studi di perguruan tinggi. Namun, mata pelajaran dari program tertentu boleh juga diambil oleh peserta didik yang telah memilih program lain untuk memperkaya bidang karirnya.

Mengingat kemungkinan bervariasinya mata pelajaran yang dipilih peserta didik maka sekolah perlu menunjuk petugas pengelola data akademik untuk

mendata kemajuan belajar setiap peserta didik dan menyimpannya dengan baik yang dapat dibuka kembali setiap diperlukan. Sekolah mengatur jadwal kegiatan pengganti bagi peserta didik yang pernah absen dan mengatur jadwal kegiatan remedial bagi peserta didik yang belum mencapai kompetensi minimal yang ditetapkan.

Sekolah menunjuk guru sebagai petugas pembimbing akademik yang membina peserta didik maksimum 16 orang setiap guru. Guru pembimbing akademik bertugas membantu peserta didik memilih mata pelajaran yang akan diambil pada suatu semester, memilih program jurusan, dan menyelesaikan persoalan akademik secara umum serta menjawab pertanyaan akademik dari orang tua peserta didik yang menjadi binaannya. Peserta didik yang pada suatu semester memiliki indeks prestasi (IP) tinggi maka pada semester berikutnya diberi kesempatan untuk mengambil beban belajar lebih banyak sehingga dapat mencapai kebulatan studi dalam rentang waktu kurang dari enam semester, dan sebaliknya.

Tujuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan berikut: (1) tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengertian, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut, (2) tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut, (3) tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) peningkatan iman dan taqwa serta akhlak mulia, (2) peningkatan kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik (3) keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan (4) tuntutan pembangunan daerah dan nasional (5) tuntutan dunia kerja, (6) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, (7) agama, (8)

dinamika perkembangan global, (9) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan, (10) Kondisi sosial budaya masyarakat setempat, (11) Kesetaraan jender, (12) karakteristik satuan pendidikan.

Struktur dan Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tertuang dalam Standar Isi, yang dikembangkan dari kelompok mata pelajaran sebagai berikut: (1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, (2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, (3) kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, (4) kelompok mata pelajaran estetika, dan (5) kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.

3. Sistem Penilaian Hasil Belajar Sekolah Kategori Mandiri

Gagasan tentang penilaian telah mengalami perubahan penting. Dalam pandangan yang baru, proses pembelajaran dan penilaian merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan. Penilaian memberikan informasi tentang pencapaian penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar oleh peserta didik. Dalam melaksanakan Sekolah Kategori Mandiri dilakukan penilaian yang berkelanjutan untuk memperoleh informasi tentang kemajuan dan keberhasilan peserta didik (Ditjen Pembinaan SMA, 2008:10). Sementara itu guru merancang dan melaksanakan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai standar kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, melalui penilaian guru akan memperoleh informasi tentang bagaimana seharusnya guru merancang/ mendesain pembelajaran dan bagaimana seharusnya peserta didik belajar. Penilaian dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, baik lisan, tulisan maupun perbuatan. Hal ini sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Penilaian hendaknya meliputi penilaian proses belajar yang sedang berlangsung. Penilaian hasil belajar dapat berupa konsep yang telah dikuasai, sikap dan nilai yang telah berkembang pada diri siswa, serta keterampilan proses yang telah dibina (Moch Uzer Usman, 1994:63).

Menurut Mulyasa (2006: 259-260) penilaian hasil belajar dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dapat dilakukan dengan 1)

penilaian kelas, 2) tes kemampuan dasar, 3) penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, 4) *benchmarking* dan 5) penilaian program. Pertama, Penilaian Kelas, dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir. Penilaian kelas dilakukan oleh guru untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta didik, mendiagnosa kesulitan belajar, memberikan umpan balik untuk perbaikan proses pembelajaran, dan penentuan kenaikan kelas. Kedua, tes kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang diperlukan dalam rangka memperbaiki program pembelajaran (program *remedial*). Tes kemampuan dasar dilakukan pada setiap tahun akhir kelas III. Ketiga, penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, pada akhir semester dan tahun pelajaran diselenggarakan kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu tertentu. Untuk keperluan sertifikasi, kinerja, dan hasil belajar yang dicantumkan dalam Surat Tanda Tamat Belajar tidak semata-mata didasarkan hasil penilaian pada akhir jenjang sekolah. Keempat, *Benchmarking*, merupakan suatu standar untuk mengukur kinerja yang sedang berjalan, proses, dan hasil untuk mencapai suatu keunggulan yang memuaskan. Ukuran keunggulan dapat ditentukan di tingkat sekolah, daerah, atau nasional. Penilaian dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga peserta didik dapat mencapai satuan tahap keunggulan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan usaha dan keuletannya. Kelima, penilaian program, dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan secara kontinu dan berkesinambungan.

Penilaian program dilakukan untuk mengetahui kesesuaian KTSP dengan dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, serta kesesuaiannya dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan kemajuan jaman. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: (a) Penilaian hasil belajar oleh pendidik, (b) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, (c) Penilaian pendidikan oleh pemerintah.

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan kenaikan tingkat. Penilaian hasil belajar menggunakan berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik kelompok mata pelajaran.
- c. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan terhadap semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran jasmani dan olahraga dan kesehatan. Penilaian hasil belajar untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu, pengetahuan dan teknologi melalui ujian sekolah/madrasah merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- d. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi kelulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu, pengetahuan dan teknologi dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Terkait dengan pelaksanaan ujian nasional, pemerintah menugaskan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk menyelenggarakan ujian nasional bekerjasama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/Kota dan satuan pendidikan.

Perubahan kurikulum dan kurikulum yang berorientasi pada isi pelajaran (*content based curriculum*) menjadi kurikulum yang berorientasi pada kompetensi (*competency based curriculum*) memiliki konsekuensi terhadap aspek pembelajaran di sekolah. Konsekuensi tersebut bukan hanya pada implementasi atau proses pembelajaran, tetapi juga pada penetapan kriteria keberhasilan.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan diimplementasikan berdasarkan kompetensi. Ada dua hal penting yang harus dipahami tentang evaluasi dalam KTSP (Sofyanis, 2007:67), yaitu: pertama, evaluasi merupakan kegiatan integral dalam suatu proses pembelajaran. Artinya kegiatan evaluasi ditempatkan sebagai

kegiatan yang tak terpisahkan dalam proses pembelajaran, karena evaluasi dalam konteks kompetensi bukan hanya berorientasi pada hasil (*product oriented*) akan tetapi juga pada proses pembelajaran (*process oriented*), sebagai upaya memantau perkembangan mental dan kejiwaan. Kedua, dalam konteks Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), evaluasi bukan hanya tanggung jawab guru, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab siswa. Artinya dalam proses evaluasi siswa dilibatkan oleh guru, sehingga mereka memiliki kesadaran pentingnya evaluasi untuk memantau keberhasilannya sendiri dalam proses pembelajaran (*self evaluation*). Dengan demikian siswa tidak lagi menganggap bahwa evaluasi merupakan suatu beban yang kadang-kadang mengganggu sikap mentalnya. Melalui *self evaluation* siswa akan menganggap bahwa evaluasi adalah sesuatu yang wajar yang harus dilaksanakan.

Pelaksanaan program Sekolah Kategori Mandiri dilakukan penilaian yang berkelanjutan untuk memperoleh informasi tentang kemajuan dan keberhasilan belajar peserta didik. Pada setiap tahap pembelajaran dilakukan penilaian. Penilaian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang pencapaian dan kemajuan belajar peserta didik pada setiap tahap atau unit pembelajaran yang didasarkan pada kriteria keberhasilan tertentu (tingkat ketuntasan belajar). Hasil penilaian ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan peserta didik yang boleh melanjutkan ke materi pelajaran berikutnya dan peserta didik yang perlu mendapat layanan perbaikan/remedial

Untuk pengajaran perbaikan juga diadakan penilaian yang hasilnya digunakan untuk menentukan apakah peserta didik yang bersangkutan telah berhasil mencapai tingkat penguasaan yang dipersyaratkan untuk bisa melanjutkan pada materi selanjutnya. Jika pencapaiannya selalu tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan untuk sebagian besar mata pelajaran maka perlu dipertimbangkan kemungkinan untuk kembali pada program biasa. Penilaian juga diadakan untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana penguasaan materi pelajaran yang diberikan dan keberhasilan peserta didik dalam mengikuti program belajar. Penilaian ini mencakup aspek penguasaan mata pelajaran dan aspek lainnya seperti; kematangan psikologis, kegairahan dan

kejenuhan, kesiapan program itu sendiri termasuk faktor masukan (*input*) dan proses dalam program tersebut. Hasil penilaian digunakan antara lain untuk penentuan pencapaian kompetensi, penyempurnaan program, pelayanan baik dalam kegiatan pembelajaran maupun pelayanan lainnya.

Penilaian sangat dibutuhkan untuk mengukur tingkat kemampuan dalam mengikuti pembelajaran pada Sekolah Kategori Mandiri (Ditjen Pembinaan SMP, 10-11: 2008), perkembangan intelektual maupun emosional peserta didik seperti kematangan psikologis, kegairahan, kejenuhan dan sebagainya, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pencapaian kompetensi diukur melalui tes kinerja yang dilakukan secara menerus (*continuous*) menggunakan metode pengamatan, pemberian tugas, dan ujian tulis.
2. Prestasi belajar dinilai dengan skala skor 0 – 100 yang dinyatakan dalam kategori A; B; C; D dan E dengan konversi bobot 4; 3; 2; 1 dan 0.
3. Peserta didik yang sudah memperoleh layanan khusus namun tetap belum mencapai skor (kompetensi) minimal pada mata pelajaran wajib harus mengambil ulang pada semester berikutnya, sedangkan untuk mata pelajaran pilihan boleh mengganti dengan pilihan lain pada semester berikutnya.
4. Peserta didik dinyatakan lulus SMP bila telah menyelesaikan total kredit minimal sebesar 120 SKS dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,00 dari IPK maksimal 4,00.
5. Peserta didik yang memiliki IPK < 2,00 dari batas kelulusan 2,00 harus mengulang beberapa mata pelajaran wajib dan/atau mengambil mata pelajaran pilihan lain pada semester berikutnya.
6. Sekolah melaporkan kemajuan belajar setiap peserta didik tersebut kepada orang tua peserta didik sebelum diberikan kepada peserta didik yang bersangkutan.
7. Orang tua dari peserta didik yang memiliki IP semester < 2,50 diberitahu dan diundang ke sekolah untuk rencana pemecahannya.

4. Kompetensi guru pada Sekolah Kategori Mandiri

Kompetensi adalah adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Hornby (1995: 232) mendefinisikan “*competence is being able to do something well*”. Pengertian ini dapat berbeda secara spesifik pada masing-masing bidang khusus, namun secara umum bermakna hampir sama. Konsep luas tentang kompetensi mencakup keterampilan-keterampilan dalam melaksanakan tugas, memiliki keterampilan mengatur pekerjaan, kemampuan memecahkan masalahnya dan memiliki tanggungjawab pada lingkungan sekitarnya.

Sofyanis, (2007:17) menyatakan: “*Competency as rational performance which satisfactorily meets the objective for a desired condition*”. Menurutnya, kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Dengan demikian, suatu kompetensi ditunjukkan oleh penampilan atau unjuk kerja yang dapat dipertanggungjawabkan (rasional) dalam mencapai suatu tujuan, Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.

Kebiasaan berpikir dan bertindak yang secara konsisten dan terus menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. Jnimmer mengemukakan: “*a competency refers to an individual’s demonstrated knowledge, skills, or abilities (KSAs) performed to a specific standard.*” Dalam hal ini, kompetensi merupakan penguasaan individual terhadap pengetahuan, keterampilan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu. (<http://home.att.net/~Jnimmer/Competency.htm>).

Kompetensi adalah bersifat personal dan kompleks serta merupakan satu kesatuan yang utuh yang menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai, yang dimiliki seseorang yang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan atau diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tersebut.

Kompetensi terdiri atas gabungan unsur-unsur potensi, pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai, serta kemampuan mengkoordinasikan unsur-unsur tersebut agar dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja. Bentuk dan kualitas kinerja dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal antara lain lingkungan atau iklim kerja dan tantangan atau tuntutan pekerjaan. Kualifikasi dan profesionalitas merupakan contoh bentuk perwujudan dari kompetensi yang dimiliki seseorang. Ana (2000: 22) mengemukakan bahwa kata kompetensi biasanya diartikan sebagai kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau sebagai memiliki keterampilan dan kecakapan yang diisyaratkan. Dalam pengertian ini jelas bahwa setiap cara yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang ditujukan untuk mencapai kompetensi adalah untuk mengembangkan manusia yang bermutu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sebagaimana diisyaratkan.

Menurut Finch & Crunkilton (1979:220), "*Competency for vocational and technical education are those tasks, skills, attitudes, values and appreciations that are deemed critical to successful employment.*" (kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, nilai-nilai, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan). Kompetensi diartikan pula sebagai "perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak." (Mulyasa, 2003: 37). Lebih jauh Mulyasa menyatakan bahwa kompetensi yang menyitir pendapat McAshan diartikan sebagai "...is a knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieves, which become part of his or her being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective, and psychomotor behaviors." Kompetensi ini mempunyai pengertian sebagai pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang dan telah menjadi bagian dirinya sehingga ia mampu melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.

Kompetensi menurut Spencer (1993) adalah: "*an underlying characteristic of an individual what is causally related to effective or superior performance in a job; an underlying characteristic which contributes to*

outstanding performance in a particular job” (karakter mendasar dari seseorang yang menyebabkannya sanggup menunjukkan kinerja efektif atau superior di dalam suatu pekerjaan). Ini berarti kompetensi merupakan indikator kemampuan untuk bekerja secara sistematis dan terencana sehingga dapat diperoleh hasil kerja yang optimal. Kompetensi merupakan faktor utama yang dimiliki individu berprestasi unggul (*the best performer*).

Salah satu implikasi yang menentukan keberhasilan program Sekolah kategori Mandiri ialah adanya guru-guru yang memiliki karakteristik dan keterampilan untuk dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Sebagai suatu profesi, terdapat sejumlah kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru, yaitu meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi Sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Menurut Pasal 28 Ayat 3 Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, ada empat kompetensi yang harus dimiliki seorang guru:

1. Kompetensi pedagogik: kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, meliputi, pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya
2. Kompetensi kepribadian: (kemampuan personal yang mencerminkan) kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia
3. Kompetensi sosial: kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sejawat pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar
4. Kompetensi profesional: kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (terkait dengan Standar Isi, juga dikenal sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

Penelitian yang dilaksanakan Suparlan (2008:112), menunjukkan bahwa guru perlu memiliki seperangkat keterampilan dan kompetensi agar dapat

mengajar secara efektif, yaitu (1) menguasai pengetahuan teoretikal tentang pembelajaran dan tingkah laku manusia, (2) menunjukkan sikap yang menunjang proses pembelajaran dan hubungan antara manusia secara murni, (3) menguasai pengetahuan dalam mata pelajaran yang diajarkan, (4) memiliki kemampuan kecakapan vertikal yang mempermudah siswa untuk belajar.

Karakteristik guru untuk program Sekolah Kategori Mandiri: (1) karakteristik filosofi; karakteristik filosofi menentukan pendekatan mereka terhadap siswa di kelas. Guru perlu mencerminkan sikap kooperatif dan demokratis, serta mempunyai kompetensi dan minat terhadap proses pembelajaran, (2) Karakteristik Kompetensi; kompetensi profesional meliputi strategi untuk mengoptimalkan belajar siswa, keterampilan bimbingan dan penyuluhan, dan pemahaman psikologis siswa. (3) Karakteristik Pribadi; meliputi motivasi, kepercayaan diri, rasa humor, kesabaran, minat luas dan keluwesan (Latifah, Ditjen Pembinaan SMp, 2008)

Berdasarkan uraian diatas, banyak pandangan dan pendapat tentang guru yang efektif. Karakteristik-karakteristik guru efektif tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugasnya Karakteristik ini memberikan panduan agar guru dapat menguasai berbagai strategi dan metode pembelajaran. Karakteristik guru efektif ‘menggunakan pelbagai kaidah dan pendekatan dalam pengajarannya’. Karakteristik ini memberikan panduan agar guru dapat menguasai berbagai strategi dan metode pembelajaran. Guru dituntut tidak hanya dapat menggunakan ceramah setiap mengajar. Guru dituntut dapat menggunakan metode lain yang lebih efektif, seperti diskusi, pemberian tugas, portofolio, bahkan juga strategi ‘*contextual teaching learning*’. Bahkan pada era teknologi informasi sekarang ini, guru harus menguasai teknologi informasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini dapat dimaklumi karena berbagai sumber belajar kini dapat diperoleh dari dunia maya melalui internet, para guru dapat menambah pengetahuan dan ketrampilannya dari berbagai sumber yang terdapat di internet, beberapa situs dapat dibuka di internet. Dari situs ini, para guru dapat mencari berbagai informasi tentang berbagai hal, termasuk dunia pendidikan.

5. Evaluasi Program

a. Pengertian evaluasi dan evaluasi program

Evaluasi adalah penentuan atas manfaat atau guna dari sesuatu hal, yaitu mencakup proses penggambaran, pencaharian, dan pemberian informasi yang digunakan untuk memberikan penilaian efektifitas suatu program, prosedur, atau kegunaan potensial dari pendekatan-pendekatan alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Kaufman (1980:5), *“Evaluation is an area which has been experiencing growth, development, and change. It used to be primarily concerned with determining the relationships between intentions and performance.”* Evaluasi merupakan suatu upaya menentukan hubungan antara tujuan dan kinerja untuk diperbandingkan sehingga diketahui efektifitas keterlaksanaan suatu program. Menurut Fernandes (1984:7), *“educational evaluation is the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives”*. Evaluasi adalah proses penggambaran perolehan dan pemberian informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Menurut Stufflebeam (1985:3), *“evaluation is the systematic assessment of the worth or merit of some object.”* Evaluasi adalah pengukuran yang sistematis atas kebermanfaatan dan keberartian suatu program. *Worth and merit* merupakan inti dari suatu evaluasi dilakukan, karena *worth and merit* seorang evaluator akan mengukur suatu program tertentu apakah sudah mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.

Worthen (1973:129) menyatakan pengertian evaluasi sebagai berikut:

“Evaluation is the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternative. Process, a particular, continuing, and cyclical activity. Delineating, focusing informations requirements to be served evaluation trough such steps as specifying, defining, and explaining. Obtaining, making available trough such processes as collecting, organizing and analizing, and through such formal means as statistics and measurment. Providing, fitting together into systems or subsystems that best served the needs or purpose of the evaluation.”

Berdasarkan pendapat Worthen di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian evaluasi mempunyai konotasi kegiatan pengumpulan data atau informasi tentang pencapaian tujuan, proses dan pelaksanaan suatu program, dilakukan secara sistematis dan metodologik ilmiah sehingga menghasilkan data yang akurat dan objektif. Hasil evaluasi ini dapat dipergunakan untuk menentukan nilai atau tingkat keberhasilan suatu program dilihat dari segi efektifitas maupun efisiensinya untuk pertimbangan pelaksanaan program selanjutnya. evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk membantu pengambil keputusan (*decision maker*) dalam menentukan kebijakannya menyangkut program yang dievaluasi. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa evaluasi adalah kegiatan melakukan pengumpulan data suatu program melalui proses penggambaran, perolehan dan pelaporan. Hasil pelaporan tersebut nantinya dapat digunakan sebagai masukan guna meningkatkan efektifitas program atau mencari jalan alternatif lain. Program adalah suatu unit kegiatan, sehingga program merupakan sebuah sistem yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan tidak hanya sekali tetapi berkesinambungan (Suharsimi, 2004:3). Dengan demikian, evaluasi program merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengukur pencapaian tujuan suatu program yang telah ditetapkan.

b. Model-Model Evaluasi

Model evaluasi merupakan hal penting dalam penelitian evaluasi. Ia mempunyai peran mengarahkan dalam pengumpulan informasi mengenai suatu program yang berguna sebagai bahan pengambilan keputusan, apakah suatu program akan dimodifikasi, dipertahankan dan/atau dihentikan. Menurut Fernandes (1984:7), terdapat sejumlah model evaluasi yang sering atau umum digunakan, yakni: (1) CIPP model, (2) Stake's model, (3) Discrepancy model, (4) Scriven's model, (5) CSE model. Di antara model tersebut adalah sebagai berikut:

1). Model CIPP

Model CIPP adalah model yang dikemukakan oleh Stufflebeam dan Shinkfield. Mereka merumuskan evaluasi sebagai suatu proses

menggambarkan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Agar suatu kegiatan evaluasi dapat memperoleh informasi yang akurat dan objektif, maka mereka membagi evaluasi kedalam empat macam bagian, yaitu: (1) *Context evaluation*, (2) *Input evaluation*, (3) *Process evaluation*, dan (4) *Product evaluation*.

2). Model Stake

Menurut Stake, terdapat dua kegiatan mendasar dalam melakukan evaluasi yaitu (1) *description*, (2) and *judgement* (diskripsi dan pertimbangan), serta terdapat tiga fase dalam melakukan evaluasi yaitu; (1) *Antecedents* (konteks), (2) *Transaction* (proses), (3) and *Outcomes* (hasil). *Description* berarti menunjukkan tentang suatu seperti apa adanya (apa yang sesungguhnya terjadi), dan *judgement* berarti mengukur apa yang terjadi dengan kriteria yang diharapkan atau tujuan.

3). Model Kesenjangan (*Discrepancy Model*)

Penilaian kesenjangan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara standar yang ditentukan dalam program dengan penampilan aktual dari program. Langkah-langkah dalam model kesenjangan yaitu: (1) penyusunan desain, (2) pemasangan instalasi, (3) proses, (4) pengukuran tujuan, (5) perbandingan (Kaufman, 1980:33). Kunci dari model kesenjangan adalah dalam hal membandingkan penampilan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Model kesenjangan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara kriteria yang sudah ditetapkan dalam program yang direncanakan dengan penampilan aktual dari program tersebut.

4). Model Scriven

Scriven adalah penggagas istilah evaluasi *formatif* dan *summatif*. Evaluasi *formatif* adalah evaluasi yang dilaksanakan selama program tersebut berjalan yang berguna untuk perbaikan suatu program. Evaluasi *summatif* adalah evaluasi yang dilakukan pada akhir program atau setelah program terlaksana, yang berguna untuk melihat dampak, manfaat atau kegunaan suatu program.

5). Model *Center for the study of Evaluation (CSE)*,

Model ini dibagi menjadi 4 tahap yaitu (1) *needs assessment*, (2) *program planning*, (3) *formative evaluation*, (4) *summative evaluation*. Pertama model *Needs Assessment*; dalam tahap ini evaluator memusatkan perhatian pada penentuan masalah pertanyaan yang diajukan: (a) hal apakah yang dipertimbangkan sehubungan dengan keberadaan program ini, (b) kebutuhan apakah yang terpenuhi sehubungan dengan adanya pelaksanaan program ini, (c) Tujuan jangka panjang apakah yang dapat dicapai melalui program ini. Kedua Model Program *Planning*, dalam tahap kedua dari CSE ini evaluator mengumpulkan data yang terkait langsung dengan pembelajaran dan mengarah pada penentuan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap kesatu. Dalam tahap perencanaan ini program proses pelajar mengajar dievaluasi dengan cermat untuk mengetahui apakah rencana pembelajaran telah disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Evaluasi tahap ini tidak lepas dari tujuan yang telah dirumuskan, ketiga model *Formative Evaluation*, pada tahap ini evaluator memusatkan perhatian pada keterlaksanaan program. Dengan demikian, evaluator diharapkan betul-betul terlibat dalam program karena harus mengumpulkan data dan berbagai informasi dari pengembang program, Keempat model *Summative Evaluation*, para evaluator diharapkan dapat mengumpulkan semua data tentang hasil dan dampak dari program. Melalui evaluasi sumatif ini diharapkan dapat diketahui apakah tujuan yang dirumuskan untuk program sudah tercapai, dan jika belum, dicari bagian mana yang belum dan apa penyebabnya.

Model evaluasi yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah model evaluasi yang dikembangkan oleh Provus, yaitu model kesenjangan (*discrepancy model*). Hal itu sesuai dengan fokus masalah penelitian yang meliputi (1) penyusunan desain, (2) pemasangan instalasi, (3) proses, (4) pengukuran tujuan, (5) perbandingan, sehingga diharapkan memperoleh gambaran yang objektif terkait dengan permasalahan penelitian. Selain itu, pertimbangan pemilihan model ini didasarkan asumsi bahwa melalui model ini diperoleh dua hal yang mendasar meliputi adanya kesenjangan dan mendeskripsikannya, maka hal ini dapat

mengungkap kesiapan dalam implementasi sekolah kategori mandiri secara lengkap dan akurat.

G. Metode Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian Evaluasi Kesiapan Implementasi Program Sekolah Kategori Mandiri ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Banguntapan Bantul. Waktu pelaksanaan penelitian pada bulan Mei – Agustus 2010.

2. Subyek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu subyek *informan* dalam hal ini Dinas Pendidikan, dan subyek *key informan*, yaitu kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, guru, staf administrasi dan siswa.

3. Pendekatan Evaluasi

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang didukung dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mendapatkan hasil evaluasi yang berupa tanggapan yang disajikan dalam bentuk angket yang ditujukan kepada kepala sekolah, guru dan siswa didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini merupakan proses kesiapan implementasi sekolah kategori mandiri. Pendekatan ini digunakan untuk menangani data-data yang bersifat kuantitatif dengan demikian diharapkan dapat diperoleh pemahaman dan penafsiran yang lebih menyeluruh mengenai kesiapan implementasi sekolah kategori mandiri. Pendekatan kualitatif digunakan dengan pertimbangan bahwa gejala penelitian ini merupakan proses yang dilakukan dengan membandingkan suatu kejadian, kegiatan, dan produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan (Fernandes, 1984:9-10) melalui kajian terhadap perilaku atau aktifitas para pelaku yang terlibat di dalamnya, yang diungkap secara deskriptif dengan menggambarkan keadaan atau status fenomena yang ada.

Mengadakan evaluasi berarti melakukan dua langkah kegiatan yaitu kegiatan mengukur dan kegiatan menilai (Suharsimi, 2006:2). Menurut Allen & Yen (Djemari Mardapi, 2004:13), mengukur adalah kegiatan penentuan angka dengan cara yang sistematis untuk menyatakan keadaan individu. Berkaitan dengan hal itu, menurut Djemari Mardapi (2004:13), pengukuran membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria, *assessment* menjelaskan dan menafsirkan hasil pengukuran, sedang evaluasi adalah penetapan nilai atau implikasi suatu perilaku.

Berdasarkan uraian pengertian di atas, maka pilihan model *Discrepancy* sebagai model yang digunakan dalam penelitian evaluasi ini diharapkan dapat memberi metode yang sistematis untuk mengevaluasi antara tujuan yang diharapkan dengan kenyataan riil yang ada dalam kesiapan implementasi di sekolah kategori mandiri SMP N 2 Banguntapan Bantul.

Komponen dalam evaluasi model kesenjangan menurut *Malcolm Provus* dapat dibedakan menjadi empat jenis ditinjau dari kepentingannya yaitu:

- a. *Design stage* yaitu penyusunan desain, di dalamnya tercakup Penyusunan Program serta menentukan orang-orang yang berperan dalam melaksanakan kesiapan dalam implementasi Sekolah Mandiri
- b. *Installed programme* atau pemasangan instalasi, mencakup usaha untuk melihat apakah program yang telah berjalan itu selaras dengan perencanaannya.
- c. *Process* atau proses, mencakup bagaimana proses kesiapan implementasi Sekolah Kategori Mandiri SMP N 2 Banguntapan Bantul.
- d. *Product* atau produk, mencakup kegiatan pengukuran untuk mengetahui apakah implementasi Sekolah Kategori Mandiri SMP N 2 Banguntapan Bantul sudah tercapai pada tujuan akhir.
- e. *Comparation programme* atau model perbandingan yaitu antara model

sekolah SMP Formal Standar dengan model SMP Negeri 2
Banguntapan Bantul Sekolah Kategori Mandiri

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, yang bertujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya tentang evaluasi kesiapan implementasi sekolah kategori mandiri.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Teknik pencermatan digunakan untuk mengumpulkan data kesiapan dalam implementasi sekolah kategori mandiri.
- b. Teknik wawancara digunakan untuk mengungkap kesiapan staf administrasi dan mengungkap kendala-kendala yang dihadapi dalam kesiapan sekolah kategori mandiri. Instrumen yang digunakan dalam teknik wawancara adalah wawancara terstruktur, artinya pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan sudah disusun terlebih dulu. Secara lengkap metode dan teknik pengumpulan data serta sumber dalam penelitian ini tampak pada **tabel 1 berikut**.

Tabel 1

Metode Pengumpulan Data, Jenis Instrumen serta Sumber Data Penelitian

No	Aspek yang di Nilai	Indikator Penilaian	Sumber informasi	Alat pengumpul data
I Design stage (Penyusunan program)				
1.	Tujuan program	a. Upaya sekolah mewujudkan sekolah kategori mandiri b. Kerjasama dan meningkatkan peran stakeholder c. Supervisi dan evaluasi	Kepala sekolah, guru,	-Angket
II Installed programme (Program berjalan sesuai rencana)				
2.	a. Upaya kepala sekolah dan gurumewujudkan SKM	a. Menyelenggarakan pendidikan sesuai standar pendidikan nasional b. Kerjasama dan terlaksananya peran stakeholder c. Sebagai model SKM	Kepala sekolah	-Angket
	b. Upaya guru dalam mewujudkan SKM	a. Menyelenggarakan pendidikan sesuai standar pendidikan nasional b. Kerjasama dan terlaksananya peran stakeholder c. Sebagai model SKM d. Perencanaan pengajaran	Guru	-Angket
	c. Kemampuan Staf administrasi	Kemampuan sumber daya manusia	Staf administrasi	-Wawancara
III Proses				
	a. Kepala sekolah Upaya kepala sekolah mewujudkan SKM	a. Sosialisasi SKM b. Peningkatan kompetensi c. Membimbing d. Mengawasi	Kepala sekolah	Angket
	b. Guru Upaya guru dalam mewujudkan SKM	a. Pemahaman guru tentang SKM b. Perencanaan pembelajaran c. Pelaksanaan pembelajaran d. Penilaian hasil belajar	Guru	-Angket
	c. Siswa Pemahaman tentang SKM	a. Sosialisasi Sekolah Kategori Mandiri b. Proses belajar mengajar c. Pelaksanaan pembelajaran d. Keberhasilan pembelajaran e. Penilaian hasil belajar	Siswa	-Angket -Pengamatan
IV Produk				
	Upaya kesiapan kepala sekolah dan guru	Tersusunnya (terwujudnya) model pembelajaran Sistem Kredit Semester (SKS) untuk satuan pendidikan SMP	Kepala sekolah, guru	-Angket
V Perbandingan				
	Tujuan program	a. Melaksanakan 8 Standar Nasional Pendidikan b. Masa studi c. Penilaian hasil belajar	Kepala sekolah, guru	-Angket

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif evaluatif yang bertujuan memberikan gambaran realitas suatu program dengan menerapkan konsep teori yang telah dikembangkan terhadap hal-hal yang dievaluasi. Dalam hal ini evaluasi dilakukan adalah kesiapan implementasi Sekolah Kategori Mandiri SMP N 2 Bangunatapan Bantul

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan dan memaknai data dari masing-masing komponen tersebut dibandingkan dengan acuan kriteria yang telah ditentukan, yaitu berdasarkan kriteria Direktorat Pembinaan SMP untuk menetapkan SMP kategori mandiri ke dalam lima level atau kriteria. Pelevelan atau kriteria tersebut didasarkan pada tingkat pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pelaksanaan pembinaan baik oleh pusat maupun daerah, dan penyusunan program kerja oleh sekolah. Pelevelan atau kriteria tersebut dapat dilihat dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2
Kategori Sekolah Mandiri

Level	Kategori	Pemenuhan SNP (%)	Keterangan
1	Standar	< 30	SMP Standar I
2	Standar	30 s/d < 50	SMP Standar II
3	Standar	50 s/d < 75	SMP Standar III
4	Mandiri	75 s/d < 100	SMP Mandiri I
5	Mandiri	100	SMP Mandiri II

(Sumber: Ditjen. Pembinaan SMP, 2008:12)

Keterangan:

- 1) SMP Kategori Standar I melaksanakan Standar Nasional Pendidikan kurang dari 30,00%
- 2). SMP Kategori Standar II melaksanakan Standar Nasional Pendidikan antara 30,00% sampai 50,00%
- 3). SMP Kategori Standar III melaksanakan Standar Nasional Pendidikan antara 50,00% sampai 75,00%
- 4). SMP Kategori Mandiri I melaksanakan Standar Nasional Pendidikan antara 75,00% sampai 100,00% (belum sepenuhnya melaksanakan Standar Nasional Pendidikan)
- 5). SMP Kategori Mandiri II melaksanakan Standar Nasional Pendidikan 100,00% (memenuhi/melampaui Standar Nasional Pendidikan)

H.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan rencana analisis yang telah diuraikan dalam metodologi penelitian, peneliti melakukan pengujian statistik deskriptif untuk mengevaluasi kesiapan implementasi Sekolah Kategori Mandiri SMP Negeri 2 Banguntapan. Hasil evaluasi ini sekaligus dapat menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi sekolah mandiri.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif yang dilengkapi oleh analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kuantitatif menggunakan bantuan program *SPSS versi 13.00 for windows*, yang bertujuan memperoleh hasil analisis yang akurat. Analisis deskriptif kualitatif menggunakan metode interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Haberman, yaitu meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi data

Evaluasi kesiapan dengan model kesenjangan (*Discrepancy Model*) disebut juga model *Provus* melibatkan lima komponen, yaitu : Tujuan Program, *Installed* Program, Proses, Produk dan Perbandingan. Secara berurutan tiap komponen dan aspek didalamnya akan dilihat ketercapaian pelaksanaannya, kemudian berdasarkan persentase pelaksanaannya dilakukan pelevelan atau kriteria kemandirian sekolah. Sekolah yang dapat melaksanakan komponen 100 % Standar Nasional Pendidikan dikategorikan sebagai SMP Kategori Mandiri II, dan yang melaksanakan Standar Nasional Pendidikan kurang dari 30% dikategorikan SMP Kategori Standar I, seperti diuraikan pada tabel 5. Berikut dijelaskan evaluasi hasil penelitian tiap komponen:

1. Evaluasi Tujuan Program SMP Negeri 2 Banguntapan Bantul

Tabel 3

Persentase Keterlaksanaan Tujuan Program di SMP Negeri 2 Banguntapan

No	Aspek	Sekor Hipotesis	Sumber Data			
			Guru		Kepala Sekolah	
			Sekor Empiris	%	Sekor Empiris	%
1	Upaya sekolah mewujudkan sekolah kategori mandiri	89	72.90	72.10	76.00	80.36
2	Kerjasama dan meningkatkan peran stakeholder	8	6.57	82.08	7.00	87.50
3	Supervisi dan evaluasi	8	6.43	80.42	6.00	75.00
Komponen Tujuan Program			78.20			80.95

Sumber : Hasil perhitungan statistik deskriptif

Menurut penilaian guru, komponen Tujuan Program dapat dilaksanakan mencapai 78.20%, sedangkan menurut kepala sekolah mencapai 80.95 %. Hasil itu bila disesuaikan dengan kriteria penilaian Sekolah Kategori Mandiri maka bahwa SMP N 2 Banguntapan termasuk dalam SMP Kategori Mandiri I, untuk komponen Tujuan Program, meskipun secara nominal terdapat variasi sekor,

tetapi masih berada dalam peringkat yang sama. Hal itu berarti bahwa SMP N 2 Banguntapan telah siap dalam melaksanakan Sekolah Kategori Mandiri.

Perbedaan penilaian pelaksanaan tersebut, berkaitan dengan perbedaan tanggung jawab antara fungsi guru dan peran kepala sekolah. Perbedaan dua fungsi tersebut berdampak terhadap pandangannya terhadap aspek-aspek Tujuan Program, sehingga terjadi pergeseran dalam menilai pelaksanaannya di sekolah.

2. Evaluasi *Installed* Program SMP Negeri 2 Banguntapan

Ada tiga aspek dalam komponen *Installed* Program bagi kepala sekolah dan empat aspek bagi guru. Aspek pertama yaitu Program Sesuai dengan Rencana, kedua, Kerjasama dan Terlaksananya Peran Stakeholder, ketiga, Sebagai Model atau Rujukan Sekolah Kategori Mandiri. Dan aspek keempat (khusus bagi guru) adalah Perencanaan Pengajaran. Hasil evaluasi pelaksanaan berdasarkan data dari guru menunjukkan komponen *Installed* Program berhasil dilaksanakan 66.56%, sedangkan berdasarkan data dari kepala sekolah pelaksanaannya mencapai 64.77%. Bila dibandingkan dengan kriteria penilaian yang ditentukan.

Kategori diatas disebabkan karena SMP N 2 Banguntapan tersebut belum melaksanakan ciri khas penyelenggaraan pembelajaran Sekolah Kategori Mandiri yaitu pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan Satuan Kredit Semester. Tidak terlaksananya salah satu ciri khas itu karena oleh pihak terkait belum menyusun draft pembelajaran dengan Sistem Satuan Kredit Semester oleh pihak terkait pihak sekolah (guru dan kepala sekolah) mengalami kesulitan dalam menerapkannya.

Hasil evaluasi pelaksanaan *Installed* program berdasarkan data dari guru mencapai 58.97% dan masuk dalam kriteria SMP Kategori Standar III, sedangkan berdasarkan data dari kepala sekolah mencapai 49.27% dan masuk dalam kriteria SMP Kategori Standar II. Berdasarkan kedua data itu menunjukkan bahwa SMP Negeri 2 Banguntapan belum masuk dalam sekolah Kategori Mandiri dalam komponen *Installed* Program.

Dari persentase pelaksanaan tiap aspek, aspek 3 (sebagai Model / Rujukan Sekolah Kategori Mandiri) pelaksanaannya dinilai paling rendah. Berdasarkan

data yang diperoleh dari guru hanya 28.33% dan kepala Sekolah 0%. Rendahnya pelaksanaan ini menyebabkan aspek secara keseluruhan sebagai kesatuan komponen *Installed Program* menjadi rendah atau belum masuk dalam kriteria SMP Kategori Mandiri.

Berbeda dengan aspek pertama (Program sesuai dengan rencana), kedua (Kerjasama dan Terlaksananya Peran Stakeholder) dan keempat (Perencanaan Pengajaran) yang lebih berfokus pada pengukuran internal sekolah, aspek ketiga (sebagai Model / Rujukan Sekolah Kategori Mandiri) yang ditentukan oleh adanya kunjungan sekolah lain dengan maksud mengacu atau merujuk ke sekolah yang lain. Sehingga hal ini mengakibatkan pelaksanaannya mencapai persentase tinggi dalam aspek yang lain, namun karena tidak digunakan sebagai rujukan sekolah lain, hal ini dapat menurunkan penilaian pelaksanaan *Installed Program*, selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4, sebagai berikut:

Tabel 4
Persentase Keterlaksanaan Installed Program di SMP Negeri 2 Banguntapan

No	Aspek	Sumber Data			
		Guru		Kepala Sekolah	
		Sekor Empiris	%	Sekor Empiris	%
1	Program sesuai dengan rencana	29.67	68.92	32.00	72.81
2	Kerjasama dan Terlaksananya Peran Stakeholder	2.37	59.17	3.00	75.00
3	Sebagai model/rujukan sekolah kategori mandiri	0.57	28.33	0.00	0.00
4	Perencanaan pengajaran	19.07	79.44	-	-
Komponen Installed Program		58.97			49.27

Sumber : Hasil perhitungan statistik deskriptif

3. Evaluasi Komponen Proses

Aspek yang diukur dalam komponen proses yaitu Upaya Mewujudkan Sekolah Kategori Mandiri (SKM). Hasil pengujian deskriptif berdasarkan data dari guru menunjukkan upaya tersebut telah berhasil dilaksanakan 74.26%, sehingga SMP N 2 Banguntapan sekolah tersebut termasuk dalam kriteria SMP Standar III. Hal ini menunjukkan bahwa komponen Proses tersebut belum mencapai persentase minimal untuk dikategorikan mandiri. Akan tetapi, persentase berdasarkan data dari kepala sekolah menunjukkan telah berhasil dilaksanakan sampai 78.13 % dan masuk dalam SMP Kategori Mandiri I, berarti komponen proses dinilai sudah mandiri. Perbedaan itu disebabkan oleh fungsi dan peran guru dan kepala sekolah yang berbeda, salah satunya guru berperan langsung dalam proses belajar mengajar, sedangkan kepala sekolah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.

Adanya perbedaan persentase diatas, maka digunakan nilai tengah dari keduanya, yaitu dengan menjumlahkan skor dari penilaian guru ditambah dengan skor penilaian kepala sekolah, kemudian dibagi 2, sehingga diperoleh persentase pelaksanaan sebesar 76.19% SMP Kategori Mandiri I.

Berdasarkan penelitian, salah satu penyebab berhasilnya sekolah mencapai SMP Kategori Mandiri I dalam komponen Proses adalah sekolah telah melaksanakan *moving class*, hal ini merupakan ciri khusus Sekolah Kategori Mandiri.

2. Evaluasi Komponen Produk

Aspek yang diukur dalam komponen Produk adalah Upaya Kesiapan guru dalam mewujudkan Sekolah Kategori Mandiri (SKM). Hasil pengujian deskriptif berdasarkan data dari guru menunjukkan upaya ini telah berhasil dilakukan mencapai 54.17%. Sekor itu jika dibandingkan dengan kriteria yang ditentukan, maka termasuk dalam kriteria SMP N 2 Banguntapan Standar III, demikian juga persentase berdasarkan data dari kepala sekolah, masih berada dalam kriteria SMP Kategori Standar III dengan pelaksanaan sebesar 43.75%. Hal itu disebabkan karena proses belajar mengajar belum dilaksanakan berdasarkan Satuan Kredit Semester, sehingga siswa tidak dapat mengambil mata pelajaran yang sesuai

bakat, minat, dan kemampuannya. Serta siswa tidak dapat menyelesaikan masa studi dalam waktu sesingkat-singkatnya.

3. Evaluasi Komponen Perbandingan

Komponen Perbandingan ini mengevaluasi perubahan kemampuan pelaksanaan aspek-aspek kemandirian sekolah, antara waktu *dulu* ketika sebagai sekolah kategori formal standar dengan waktu *kini* setelah dipercaya menjadi kategori sekolah mandiri, selanjutnya diuraikan tentang pelaksanaan aspek kemandirian terlihat mengalami penurunan. Penilaian kepala sekolah rata-rata pelaksanaan aspek kemandirian oleh sekolah mengalami penurunan sebesar 41.25%, sedangkan menurut penilaian guru mencapai 10.81%). Penurunan juga terjadi dalam setiap aspek kemandirian.

4. Implementasi Sekolah Kategori Mandiri (Sumber : Siswa)

Evaluasi kemandirian juga melibatkan siswa sebagai nara sumber, siswa diminta tanggapannya terhadap implementasi aspek-aspek atau proses yang seharusnya dilaksanakan oleh sekolah kategori mandiri. Di sini siswa bukan didudukan sebagai evaluator, melainkan “dimanfaatkan” informasinya sebagai kroscek pelaksanaan aspek-aspek sekolah mandiri.

Hasil pengujian deskriptif menemukan skor rata-rata tanggapan siswa terhadap pelaksanaan aspek kemandirian sekolah sebesar 46.09 atau 68.45%, dalam tabel kategorisasi termasuk SMP Kategori Standar III. Hal ini menunjukkan SMP N 2 Banguntapan belum termasuk kriteria SMP Kategori Mandiri.

5. Pelaksanaan Upaya Sekolah Mewujudkan Sekolah Kategori Mandiri (Pencermatan Peneliti)

Selain berdasarkan informasi yang diberikan oleh guru, kepala sekolah, dan siswa, peneliti juga terlibat di sekolah-sekolah yang diteliti. Hasil pencermatan ini mendapatkan informasi bahwa pelaksanaan upaya sekolah

mewujudkan sekolah kategori mandiri sudah berjalan, dalam bentuk persentase sudah dilaksanakan sampai 55.86%. Menurut tabel kategorisasi perolehan 55.86% termasuk dalam kriteria SMP Kategori Standar III, berarti upaya yang sampai saat ini yang dilaksanakan belum mencapai SMP Kategori Mandiri.

6. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan berbagai indikator yang digunakan untuk mengungkap ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah untuk menunjang keterlaksanaan Sekolah Kategori Mandiri terungkap bahwa sarana prasarana yang dimiliki secara rata-rata mencapai 64.47%. Sekor itu bila dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan, maka sarana dan prasarana yang tersedia termasuk dalam kriteria SMP Kategori Standar III, berarti sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah belum mampu menunjang sekolah untuk masuk kedalam kategori mandiri.

Hasil wawancara yang didapatkan dari staf administrasi berkaitan dengan ketersediaan pelayanan guna menunjang keterlaksanaan sekolah kategori mandiri terungkap bahwa keempat sekolah memiliki staf administrasi yang mampu menguasai dan mengoperasikan berbagai perangkat informasi IT (*LCD, OHP, menguasai Office, Word, Excel, dan Power Point*) sebesar 80 %. Hal itu menunjukkan bahwa sekolah telah memiliki ketersediaan sumber daya yang menunjang bagi terlaksananya Sekolah Kategori Mandiri.

I. Pembahasan

Tujuan program, *Installed* program, Proses, Produk dan Perbandingan adalah komponen dalam model kesenjangan (*Discrepancy Model*) yang menunjukkan kesiapan SMP rintisan Sekolah Kategori Mandiri untuk menjadi mandiri. Dua komponen yang dapat dilaksanakan oleh sekolah mencapai lebih dari 75%, yaitu Tujuan Program dan Proses, persentase ini termasuk tinggi, sehingga berada dalam kriteria SMP Kategori Mandiri I, sedangkan untuk komponen yang lain pelaksanaannya masih kurang dari 75% sehingga tergolong kategori SMP Kategori Standar II dan III.

Komponen Tujuan Program adalah tentang penetapan aspek-aspek yang ditargetkan untuk dicapai. Seperti penetapan aspek agar guru dapat mewujudkan Sekolah Kategori Mandiri, kerjasama sekaligus meningkatkan peran stakeholder, supervisi dan evaluasi. Penetapan ini lebih banyak kepada kemampuan konseptual SMP rintisan dalam memutuskan aspek tujuan, kemampuan operasionalisasinya dalam komponen ini belum dilakukan. Hasil mandiri komponen menunjukkan SMP rintisan dapat menetapkan (memutuskan) aspek-aspek yang dapat mengantarkan menjadi sekolah mandiri.

Dengan tetap mengapresiasi keberhasilan (kemandirian) tersebut, peneliti melihat keberhasilannya terkait dengan sumbangan kurikulum yang sudah sangat jelas, hal ini ditunjukkan bahwa kurikulum pendidikan sudah sangat terinci informasinya, kemudian sekolah dan guru melaksanakannya. Sehingga ketika SMP menetapkan tujuan program, kemudian melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan yaitu Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP). Dengan demikian keberhasilan (kemandirian) dalam komponen tujuan program adalah cermin dari berhasilnya pelaksanaan kurikulum.

Installed program adalah tentang keselarasan antara pelaksanaan program dengan perencanaannya, sehingga komponen ini dapat pula dipandang sebagai kaca mata untuk melihat kemampuan SMP rintisan mandiri merealisasikan tujuan program yang sudah ditetapkan.

Hasil belum mandiri (tabel 7) pada komponen *Installed* Program menunjukkan bahwa SMP 2 Banguntapan belum dapat melaksanakan tujuan program yang telah ditetapkan. Hasil pengamatan peneliti di lapangan diketahui, untuk melaksanakan Tujuan Program sekolah harus mampu mengelola sumber daya khususnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, meskipun melalui PP nomor 19 tahun 2005 sekolah sudah dicanangkan sebagai SMP rintisan kategori mandiri, namun tidak dibarengi dengan program peningkatan kualitas sumber daya sekolah. Secara empiris SMP yang dicanangkan sebagai sekolah rintisan pada dasarnya masih sama dengan ketika belum dicanangkan. Nuansa yang terbangun adalah pada tertib administrasi, bukan pada peningkatan secara keseluruhan sebagai suatu integralistik sekolah mandiri.

Fakta ini juga yang menjelaskan kemandirian SMP N 2 Banguntapan dalam komponen produk masih berada dalam kategori standar, bahkan dalam perbandingan ditemukan kategori setelah dicanangkan sebagai sekolah rintisan mandiri justru menjadi kurang mampu dalam kemandiriannya.

Belum mandirinya komponen *Intstalled* program, produk dan perbandingan bukan berarti bertentangan dengan komponen proses yang telah dikategorikan mandiri. Karena dari pengamatan di lapangan menunjukkan proses tersebut hanya berjalan secara parsial pada aspek *Installed* Program sudah selaras. Untuk aspek lain yang belum selaras berarti belum bisa berjalan di sekolah, sehingga tidak terserap dalam evaluasi komponen proses, dengan demikian meskipun proses sudah mandiri namun belum menyeluruh pada seluruh aspek.

Untuk menguatkan hasil evaluasi kemandirian tersebut, peneliti juga melakukan evaluasi berdasarkan data yang diberikan oleh siswa dan hasil pengamatan peneliti. Dalam tabel di bawah terlihat sekolah belum mandiri dalam implementasi sekolah mandiri, upaya mewujudkan sekolah kategori mandiri dan sarana prasarana.

Tabel 5
Pelaksanaan Komponen *Discrepancy Model* di SMP 2 Banguntapan
Menurut Siswa dan Pengamatan

No	Komponen	Sumber Data			
		Siswa	Peneliti (Observasi)	Rerata	Kategori
1	Implementasi Sekolah Mandiri	68.45		68.45	Standar III
2	Upaya Mewujudkan SKM		69.82	69.82	Standar III
3	Sarana dan Prasarana		64.47	64.47	Standar III

Sumber : Hasil pengujian persentase data primer

Hasil belum mandiri dalam tabel 22 tersebut masih tetap berkaitan dengan belum adanya program riil untuk mendampingi PP nomor 19 tahun 2005 yang menetapkan SMP N 2 Banguntapan tersebut sebagai sekolah rintisan mandiri. Jadi meskipun ditetapkan sebagai sekolah rintisan mandiri, namun masih menunjukkan sekolah formal standar, kecuali dari sisi administrasi menunjukkan lebih disiplin.

j. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Upaya kesiapan kepala sekolah, guru dan siswa dalam implementasi Sekolah Kategori Mandiri SMP Negeri 2 Banguntapan dalam pelaksanaan komponen kemandirian masih rendah (kurang dari 75%), hal ini menunjukkan SMP rintisan Sekolah Kategori Mandiri sampai saat ini masih belum berhasil menjadi mandiri, dalam melaksanakan komponen kemandirian mencapai kisaran antara 50% sampai dengan 75% atau termasuk SMP Kategori Standar III.
2. Kendala sekolah dalam kesiapan implementasi Sekolah Kategori Mandiri adalah pada komponen *Installed Program* dan *Produk*. Dalam *Installed program* ini SMP 2 Banguntapan masih belum bisa melaksanakan tujuan-tujuan Sekolah Kategori Mandiri. Hal ini disebabkan karena keempat sekolah tersebut belum melaksanakan ciri khas penyelenggaraan pembelajaran Sekolah Kategori Mandiri yaitu pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan Satuan Kredit Semester. Tidak terlaksananya salah satu ciri khas itu disebabkan belum disusunnya draft pembelajaran dengan Sistem Satuan Kredit Semester oleh pihak terkait sehingga pihak sekolah (guru dan kepala sekolah) mengalami kesulitan dalam menerapkannya. Komponen *Produk* dalam implementasinya belum dilaksanakan secara keseluruhannya atau secara tuntas. Hal ini disebabkan karena 1) Guru tidak merancang silabus pembelajaran berdasarkan Satuan Kredit Semester, karena sekolah belum melaksanakan pembelajaran Satuan Kredit Semester 2) Penilaian hasil belajar siswa tidak dinyatakan dalam

bentuk Indeks Prestasi, sehingga hasil belajar siswa tidak dinyatakan huruf pula. Padahal kedua penyebab di atas merupakan bagian dari ciri khas pelaksanaan Sekolah Kategori Mandiri., disamping itu siswa tidak dapat mengambil mata pelajaran yang sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Serta siswa tidak dapat menyelesaikan masa studi dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Komponen kemandirian yang sudah berhasil dilaksanakan dengan baik adalah komponen Tujuan Program dan Proses. Dalam Tujuan Program SMP rintisan sudah berhasil menetapkan target-target sebagai sekolah mandiri, dan dalam Proses SMP rintisan sudah berhasil melaksanakan program-program yang bisa dijalankan. Hal itu berarti bahwa dalam komponen Tujuan Program, keempat sekolah tersebut telah siap melaksanakan Sekolah Kategori Mandiri atau keempat sekolah tersebut telah melaksanakan 8 Standar Nasional Pendidikan. Pencapaian itu secara otomatis menunjukkan bahwa guru dan kepala sekolah memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memadai untuk menunjang terlaksananya Sekolah Kategori Mandiri, meskipun masih terdapat variasi keterlaksanaan dalam aspek-aspeknya sebagai kesatuan komponen Tujuan Program Sekolah Kategori Mandiri. Salah satu penyebab berhasilnya sekolah mencapai SMP Kategori Mandiri I dalam komponen Proses adalah sekolah telah melaksanakan *moving class*, hal ini merupakan salah satu ciri khusus Sekolah Kategori Mandiri.

3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah untuk menunjang keterlaksanaan Sekolah Kategori Mandiri terungkap bahwa sarana prasarana yang dimiliki secara rata-rata mencapai 64.47% dan termasuk dalam kriteria SMP N 2 Banguntapan Kategori Standar III, berarti sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah belum mampu menunjang sekolah untuk masuk kedalam SMP Kategori Mandiri.

K.Saran

Sejak SMP 2 Banguntapan ditetapkan sebagai SMP rintisan sekolah mandiri, dilakukan persiapan-persiapan untuk mewujudkan Sekolah Kategori Mandiri. Persiapan dari sisi penetapan target (tujuan) sudah berhasil dilakukan oleh sekolah rintisan, karena secara sistemik sudah terbangun kerjasama yang baik antara pemerintah dengan sekolah melalui kurikulum yang sudah dilengkapi dengan petunjuk yang jelas.

Namun untuk komponen kemandirian yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya sekolah (SDS) belum berhasil mandiri, hal ini dikarenakan belum ada program pendamping untuk meningkatkan SDS sekolah. Berdasarkan kekurangan ini maka agar SMP N 2 Banguntapan sebagai rintisan tersebut dapat segera berubah menjadi sekolah mandiri, harus segera dilakukan program peningkatan SDS, hal ini dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan pihak swasta atau instansi terkait yang berkompeten untuk meningkatkan mutu pendidikan, antara lain perguruan tinggi, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dan Pusat Pemberdayaan Peningkatan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (P4TK).

L. Daftar Pustaka

- Cece Wijaya. (1992). *Upaya Pembaharuan dalam Pendidikan dan Pengajaran*.(1992). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Conny Semiawan. (1985). *Pendekatan Keterampilan Proses. Bagaimana Mengaktifkan Siswa dalam Belajar?*. Jakarta: PT. Gramedia
- Depdiknas, (2001). *Belajar dan Mengajar Kontekstual*, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Depdiknas, (2008). *Konsep SKM/SSN, (Sekolah Kategori Mandiri/ Sekolah Standar Nasional)*, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Ditjen Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

- _____ (2008). *Model Penyelenggaraan SKM/SSN (Sekolah Kategori Mandiri/ Sekolah Standar Nasional)*, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Ditjen Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- _____ (2006). *Outline Model Pembelajaran Sekolah Formal Standar*. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Ditjen Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- _____ (2008). *Program Implementasi Rintisan SKM/SSN (Sekolah Kategori Mandiri/ Sekolah Standar Nasional)*, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Ditjen Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta
- Djemari Mardapi. (2004). *Penyusunan tes hasil belajar*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.Engkoswara. *Dasar-dasar*
- Eggen, Paul D. (1979). *Strategis for Teacher*. Information Processing Models in the Classroom. New Jersey: Prentice- Hall, Inc., Englewood Cliffs.
- E. Mulyasa. (2006) *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Fernandes, H. J. X. (1984). *Evaluation of Educational Programs*. Jakarta: National Education Planning, Evaluation and Curriculum Development.
- Hornby, A.S. (1990). *Oxford Advanced Learner's Dictionary (New Edition)*, Oxford: Oxford University Press.
- Jnimmer. (2007). *Competency-based training tutorial*. Diambil tanggal 13 September 2007 dari <http://home.att.net/~Jnimmer/competency.htm>.
- Moch Uzer Usman. (2004) *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Oemar Hamalik. (2001). *Proses Belajar Mengajar*.. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- _____.(1993). *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

- _____.(2003) *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- _____.(2004). *Pendidikan Guru.Berdasarkan pendekatan Kompetensi*. Jakarta:PT. Bumi Aksara
- Suharsimi Arikunto. (2004). *Evaluasi program Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Suharsimi Arikunto.(2008).*Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara..
- Suparlan. (1997). *Menjadi Guru Efektif*.. Yogyakarta: Hikayat Publising
- Spencer, L.M., dan Spencer, S.M. 1993. *Competence at work: Models for superior Performance*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Syaiful Bahri Jamarah. (1996). *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Utami Munandar. (1987). *Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah*. Penuntun bagi Guru dan Orang tua. Jakarta: PT. Gramedia
- Worthen and Sanders.(1971).*Educational Evaluation: Theory and Practice*.Itasca, Illinois:F.E . Peacock Publishers, Inc.

I. Jadwal Kegiatan

NO	Urutan Kegiatan	Bulan Ke-(sejak disetujui proposal)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pra-survei												
2	Pembuatan instrumen dan proposal												
3	Seminar Proposal												
4	Observasi pengambil data												
5	Penulisan laporan hasil penelitian												
6	Seminar Hasil Penelitian												